

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi adalah teori yang menjelaskan antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal* dan dapat menjamin agen untuk menerima reward dari hasil kegiatan pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*), pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*), manfaat (*utility*), dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Kepentingan yang berbeda dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Kinerja suatu perusahaan telah dicapai oleh pihak manajemen kemudian diinformasikan kepada pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan.

Pada sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang superior dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen sudah menerima perintah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan level kompensasi secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna kegiatan manajemen. Keseluruhan tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*) pada model *principal-agent*.

2. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang ditunjukkan dan penggunaannya untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Hukum pajak menganut paham imperatif yaitu pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Jika pajak tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Oleh karena itu perusahaan melakukan berbagai perlawanan dengan tujuan untuk menghindari pajak atau disebut juga *tax avoidance* (Mardiasmo, 2018).

3. Pengindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Prakoso (2014) pengindaran pajak (*tax avoidance*) adalah segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak ataupun kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari hukum pajak yang ada tetapi tidak melanggar hukum perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang berada dalam ketentuan perpajakan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Dengan memanfaatkan celah dari undang-undang yang berlaku, perusahaan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut bisa digunakan dalam perencanaan pajak untuk meminimalisirkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengindaran pajak adalah segala upaya bagi wajib pajak untuk meminimalisirkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah yang ada di undang-undang perpajakan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system* (Safitri, 2017).

4. *Inventory Intensity* (Intensitas Persediaan)

Inventory intensity atau biasa disebut juga dengan intensitas persediaan adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk persediaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). *Inventory intensity* diukur dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam pembelian kerja. Kondisi perusahaan yang baik adalah ketika kepemilikan persediaan dan perputaran persediaan selalu dalam kondisi seimbang, yang artinya jika perputaran persediaan kecil maka terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang. Tetapi jika perputaran persediaan terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil (Fahmi, 2011).

Inventory intensity dapat menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam perputaran persediaan selama satu periode tertentu (Etty dan Rasita, 2005). Menurut Harahap (2007) *inventory intensity* menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume persediaan yang ada di perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengetahui efisiensi suatu perusahaan.

5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusional. Semakin tinggi tingkat institusional maka menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan perhitungan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham menyebabkan pemilik institusional mempunyai insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan untuk

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan, memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat, dan lebih optimis (Khurana, 2009).

6. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Tandean dan Winnie, 2016). Struktur komite audit menurut pasal 4 adalah memiliki anggota paling sedikit tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit berperan sebagai perantara antara auditor eksternal dengan auditor internal sehingga komite audit bersifat independen dan tidak terpengaruh pihak manapun, baik dari dewan direksi, auditor internal, dan auditor eksternal yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Putri, dkk 2018).

Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua perusahaan untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit bertugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, dan pelaksanaan audit di perusahaan.

7. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain. Adanya dewan komisaris independen ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi karena semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan dalam manajemen perusahaan akan semakin ketat. Jika pengawasan semakin ketat, maka pihak manajemen perusahaan akan bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisirkan adanya praktik penghindaran pajak.

Jumlah dewan komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari seluruh anggota dewan komisaris. Tugas dari dewan komisaris independen adalah bertanggung jawab dalam hal pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, dan memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Tetapi dewan komisaris independen tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak, yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Siregar dan Widyawati (2016) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5 No. 2	Variabel independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - <i>Size</i> - <i>Capital intensity</i> - <i>Inventory intensity</i>	- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Size</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
		Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Marlinda, dkk (2020) <i>Journal of Economics and Business</i> Vol. 4 No. 1 Hal. 39-47	Variabel independen: - Dewan komisaris independen - Kepemilikan institusional - Komite audit - Profitabilitas - <i>Capital intensity</i> - Ukuran perusahaan Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Cahyono, dkk (2016) <i>Journal of Accounting</i> Vol. 2 No. 2	Variabel independen: - Komite audit - Kepemilikan institusional - Proporsi dewan komisaris independen - Ukuran perusahaan - <i>Leverage</i> - Profitabilitas Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Jumlah komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
4.	Fadhilah (2014) Jurnal Akuntansi Universitas Padang Vol. 2 No. 1 Hal 1-25	Variabel independen: - Proporsi kepemilikan institusional - Proporsi dewan komisaris - Komite audit - Kualitas audit Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Rahmawati, dkk (2016) Jurnal Perpajakan Vol. 10 No. 1	Variabel independen: - Pengukuran CSR - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Dewan komisaris - Komite audit - Kualitas audit Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Pengukuran CSR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Kartana dan Wulandari (2018) Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 1 Hal. 1-13	Variabel independen: - Karakter eksekutif - <i>Leverage</i> - <i>Capital intensity</i> - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Komisaris independen - Komite audit - Kualitas audit	- Karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
		Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Amin dan Suyono (2020) <i>Journal of Economics, Business, and Engineering</i> Vol. 1 No. 2 Hal. 248-259	Variabel independen: - Kepemilikan institusional - Komisaris independen - Komite audit - Kualitas audit - Kepemilikan manajerial Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8.	Septiani, dkk (2018) Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1 Hal. 1-10	Variabel independen: - Kepemilikan institusional - Komite audit - <i>Leverage</i> - Dewan komisaris independen - <i>Firm size</i> Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Firm size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Diantari dan Ulupui (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16	Variabel independen: - Komite audit - Proporsi komisaris independen - Proporsi kepemilikan institusional	- Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
	No. 1		terhadap <i>tax avoidance</i>
	Hal. 702-732	Variabel kontrol: - Ukuran perusahaan Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
10.	Sara (2016) Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau Vol. 3 No. 1 Hal. 2223-2237	Variabel independen: - Kepemilikan institusional - Intensitas pertemuan komite audit - <i>Leverage</i> - Persentase dewan komisaris independen - Kualitas audit Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Persentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
11.	Eksandy (2017) <i>Competitive</i> Vol. 1 No. 1 Hal. 1-20	Variabel independen: - Komisaris independen - Komite audit - Kualitas audit Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak - Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
12.	Sonia dan Suparmun (2019) <i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> Vol. 73 Hal. 238-243	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Laba - Ukuran perusahaan - <i>Leverage</i> - Pertumbuhan penjualan - <i>Capital intensity</i> - <i>Inventory intensity</i> Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak - Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak - Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Pengembalian aset (laba) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
13.	Aisyah dan Setiyawati (2019) <i>Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates</i> Vol. 5 No. 7 Hal. 399-405	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> - Karakter eksekutif - Komisaris independen - Kepemilikan institusional - Komite audit Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak - Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
14.	Dwiyanti dan Jati (2019) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 27 No. 3 Hal. 2293-2321	Variabel independen: - Profitabilitas - <i>Capital intensity</i> - <i>Inventory intensity</i> Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak - <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak - <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak
15.	Richardson dan Lanis (2007) <i>Journal of Accounting and Public Policy</i> Vol. 26 Hal. 689-704	Variabel independen: - Ukuran perusahaan - <i>Leverage</i> perusahaan - Intensitas modal perusahaan - Intensitas persediaan perusahaan - Intensitas R&D perusahaan Variabel dependen: - <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR - <i>Leverage</i> perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR - Intensitas modal perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR - Intensitas persediaan perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR - Intensitas R&D perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR - Intensitas R&D perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR
16.	Putri dan Lautania (2016) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1 No. 1 Hal. 101-119	Variabel independen: - <i>Capital intensity ratio</i> - <i>Inventory intensity ratio</i> - <i>Managerial ownership</i> - <i>Institutional ownership</i> - <i>Profitability</i> Variabel dependen: - <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	- <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh secara parsial terhadap ETR - <i>Inventory intensity ratio</i> berpengaruh secara parsial terhadap ETR - <i>Managerial ownership</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR - <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR - <i>Profitability</i> berpengaruh secara parsial terhadap ETR

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
17.	Anggraeni dan Febrianti (2019) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 21 No. 1 Hal. 185-192	Variabel independen: - <i>Leverage</i> - Ukuran perusahaan - Profitabilitas - Ukuran KAP - Komite audit - Kepemilikan institusional Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
18.	Basuki (2018) Jurnal Manajemen Bisnis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol. 7 No. 1 Hal. 47-56	Variabel independen: - Komisaris independen - Komite audit - <i>Capital intensity</i> - <i>Corporate risk</i> Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate risk</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
19.	Rani (2017) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 2 Hal. 221-241	Variabel independen: - Ukuran perusahaan - <i>Financial Distress</i> - Komite audit - Komisaris independen Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Tidak dapat membuktikan pengaruh yang signifikan antara <i>financial distress</i> dan komite audit terhadap penghindaran pajak

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
20.	Asri dan Suardana (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16 No. 1 Hal. 72-100	Variabel independen: - Komite audit - Preferensi risiko eksekutif - Ukuran perusahaan - Proporsi komisaris independen Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- Komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak - Preferensi risiko eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak - Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak - Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak
21.	Triyanti, dkk (2020) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 20 No. 1 Hal. 113-120	Variabel independen: - Profitabilitas - <i>Size</i> - <i>Leverage</i> - Komite audit - Komisaris independen - Umur perusahaan Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
22.	Sari, dkk (2020) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 20 No. 2 Hal. 376-387	Variabel independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Komisaris independen - Kepemilikan institusional - Ukuran perusahaan Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
23.	Chasbiandani, dkk (2019) Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 17 No. 2 Hal. 115-129	Variabel independen: - Risiko perusahaan - Kepemilikan institusional - Komisaris independen - Kualitas audit Variabel dependen: - <i>Tax avoidance</i>	- Risiko perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
24.	Wijayanti dan Merkusiwati (2017) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 20 No. 1 Hal. 699-728	Variabel independen: - Proporsi komisaris independen - Kepemilikan institusional - <i>Leverage</i> - Ukuran perusahaan Variabel dependen: - Penghindaran pajak	- Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak - <i>Leverage</i> berpengaruh pada penghindaran pajak

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *inventory intensity*, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang akan dijelaskan melalui kerangka pemikiran di bawah ini.

1. *Inventory Intensity*

Inventory intensity atau yang biasa disebut dengan intensitas persediaan adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk persediaan (Ardyansyah, 2014).

Inventory intensity diukur dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan karena timbul biaya-biaya tambahan yang ada di dalam persediaan, sehingga menyebabkan laba yang didapatkan menjadi turun. Laba yang turun mengakibatkan beban pajak juga menurun. Sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

3. **Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi di dalam pengelolaan perusahaan (Winata,

2014). Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen dengan jumlah komite dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang (Cahyono, dkk 2016). Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

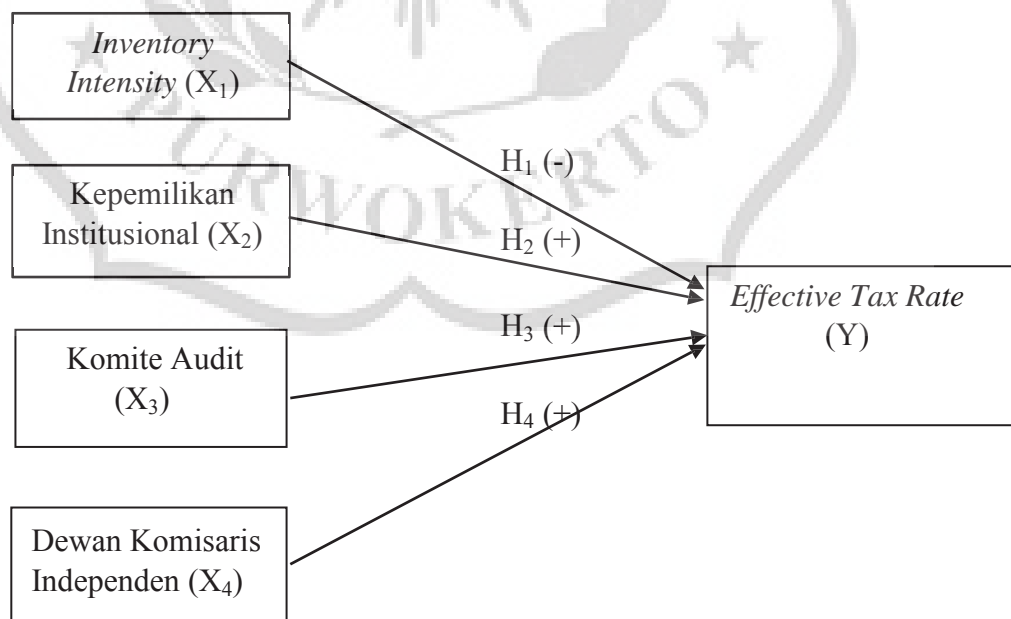
4. **Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Salah satu tugas dewan komisaris independen adalah mengontrol tindakan direksi yang bisa merugikan perusahaan maupun tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik peranan dewan komisaris independen dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Sehingga diindikasikan dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pada penelitian ini akan menggunakan ETR dalam menghitung penghindaran pajak. ETR atau *effective tax rate* adalah pengukuran yang umum digunakan dari beban pajak perusahaan dan merupakan kegiatan penghindaran pajak yang secara langsung mempengaruhi laba bersih (McGuire et al. 2011). Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* karena dapat mengidentifikasi tindakan penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan di atas, dapat dibuat skema kerangka pemikiran tentang “Pengaruh *Inventory Intensity*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak” yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap ETR yang Merupakan *Proxy* dari Penghindaran Pajak

Inventory intensity atau yang biasa disebut dengan intensitas persediaan adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk persediaan (Ardyansah, 2014). *Inventory intensity* diukur dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tingginya tingkat intensitas persediaan perusahaan dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan karena timbul biaya-biaya tambahan yang ada di dalam persediaan, sehingga menyebabkan laba yang didapatkan menjadi turun. Laba yang turun mengakibatkan beban pajak juga menurun. Sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dalam teori agensi, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang harus ditanggung untuk mengurangi beban pajak. Cara yang digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang ditandai dengan nilai ETR yang rendah. Penelitian oleh Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Putri dan Lautania (2016) menyimpulkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* dari penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1 =$ *Inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap ETR yang Merupakan Proxy dari Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam teori agensi, institusi sebagai *principal* akan menyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola investasi

perusahaan yang nantinya institusi akan terus melakukan pengawasan secara profesional mengenai perkembangan investasinya yang menyebabkan tingkat pengendalian kepada *agent* tinggi (Karina, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari *tax avoidance*. Hasil penelitian Amin dan Suyono (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari penghindaran pajak. Aisyah dan Setiyawati (2019) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap ETR yang Merupakan Proxy dari Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi di dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan

semua emiten untuk membentuk dan mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang (Cahyono, dkk 2016). Adanya komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Semakin banyak jumlah komite audit dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam teori agensi, pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal tersebut dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 2011). Sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap manajemen perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari *tax avoidance* yang ditandai dengan nilai ETR yang tinggi. Hasil penelitian Eksandy (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Aisyah dan Setiyawati (2019) juga menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Komite audit berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan

proxy dari penghindaran pajak.

4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap ETR yang Merupakan *Proxy* dari Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Salah satu tugas dewan komisaris independen adalah mengontrol tindakan direksi yang bisa merugikan perusahaan maupun tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik peranan dewan komisaris independen dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Sehingga diindikasikan dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam teori agensi, adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen (*agent*) berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris ataupun direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini membuktikan bahwa dewan komisaris independen di suatu perusahaan dapat mencegah tindakan penghindaran pajak (Indriawati, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda, dkk (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proxy dari *tax avoidance* yang ditandai dengan nilai ETR yang tinggi. Penelitian oleh Cahyono, dkk (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari penghindaran pajak. Hal senada juga dinyatakan oleh Amin dan Suyono (2020) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* dari penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR yang merupakan *proxy* dari penghindaran pajak.